

NOMOR PERTAMA

Berita

PEREKONOMIAN

Digitalisasi oleh Pengajal Buku

DITERBITKAN OLEH:
KEMENTERIAN KEMAKMURAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 6
Tahun I
17 Juli
1948

SARI DARI PRAE-ADVIES R. SOETIJO tentang :

Balai propaganda pertanian dan Desa Baru.

Guna menerangkan tudjuan Balai Propaganda Pertanian dan Desa Baru oleh prae-adviseur terlebih dahulu dengan singkat diberitjarkan berturut-turut.

I. Tudjuan dan akibat politik Ekonomi Pemerintah Belanda;

dan mungkin dengan kepandaian jang lebih tinggi djuga. Jang demikian itu tidak sukar didjalankan kiranya, berhubung sedjak Negara kita Merdeka hasrat untuk menuntut pelajaran disekolah2 menengah dan perguruan Tinggi dari masjarakat tani mulai nampak dengan njata.

Djika dikatakan banjak sekali kader jang dibutuhkan, itu bukan mengandjurkan supaja pendidikan kader2 diselenggarakan sekali gus untuk semua desa jang membutuhkan dalam kabupaten. Pendidikan jang diberikan kepada orang terlalu banjak bersama2 umumnya tidak dapat mendalam, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Oleh karenanya diusulkan, supaja dalam satu angkatan pendidikan diambilnya tidak lebih dari 40 orang tjalon kader. Djika untuk keperluan tersebut dapat disediakan asrama, nistjaja lebih pula hasil jang dapat diharap.

2. Alat-alat pendidikan.

Ini tergantung dari matjamna pendidikan, jang akan diselenggarakan; dapat dibuat sederhana sekali, dapat dibuat sempurna, sehingga minta beaja jang luar biasa banjarnya.

...

Djuga didalam menjelenggarakan alat2 pendidikan kepada masjarakat tani didesa2 diharap, supaja desa jang berkepentingan turut merasa bertanggung djawab atas djelek dan baiknya hasil pendidikan.

Ruangan untuk berkumpul, untuk taman batjaan, untuk mengadakan consultatie, menjimpan bibit pilihan dan sebagainya — djika datang waktunya harus desa jang menjelenggarakan, djika perlu dengan bantuan Pemerintah. Begitu pula kebun bibit, kambing bibit dan lembu pematjak.

Kebun tjonto dan kebun pertjobaanpun djika dianggap perlu baik diselenggarakan oleh desa jang berkepentingan, bersama2 dengan Djawatan Pemerintah jang bersangkutan.

II. Tudjuan dan pokok dasar Ekonomi Negara Republik Indonesia;

III. Tudjuan dan tjara bekerdjya dari Djawatan Pertanian Rakjat;

IV. Pembangunan masjarakat desa;

V. Tudjuan B. P. P. dan desa Baru.

I. Tudjuan dan akibat politik Ekonomi Pemerintah djaduhan.

Pada djaman V. O. C. terdapat kewajiban kerdja pertjuma dan pemungutan hasil bumi dengan ditukar atau dibeli dengan harga murah jang tidak sepadan („verplichte diensten en contingenten“). Tidak sadja aturan ini memadamkan initiatif petani, melainkan banjak djuga petani2 meninggalkan desanya untuk pindah kelain

Selain dari itu banjak pula alat2 pendidikan, jang sukar atau tidak mungkin diusahakan oleh desa2, atau daerah2 jang ketjil, misalnya : alat2 pendidikan dengan radio, dengan bioskoop, tentoonstelling dan lain2, begitu djuga pengarangan buku2 pelajaran dan batjaan, madjallah2 dan lain2 siaran. Alat2 ini hendaknya diusahakan oleh pusat di Karesidenan, Propinsi atau Negeri. Demikian alat2 pendidikan dapat disempurnakan, sedang tenaga dan beaja dapat dihemat. Djika dalam pusat itu sungguh2 ada kerdja sama jang erat antara rupa2 Djawatan dan badan2 maupun ahli2 lainnya, nistjaja pendidikan masjarakat tani akan menjadi sempurna, sehingga hasilnya pun bagus djuga.

3. Beaja pendidikan.

Terang bahwa beaja jang diperlukan untuk pendidikan masjarakat tani akan besar djumlahnya. Di Amerika, Eropah, Hindia, Djepang, Birma d.l.l. pendidikan masjarakat setjara tersebut sebagian besar dibeajai oleh penduduk sendiri, karena mereka mengerti bahwa pendidikan membawa bahagia dan kemakmuran.

Mudah-mudahan rakjat di Indonesia pun dapat diinsjafkan, bahwa pendidikan masjarakat tani adalah suatu kepentingan nasional, jang tidak melulu menjadi kewajiban Pemerintah sadja.

Achirulkalam diperingatkan dengan keras, bahwa masjarakat tani sudah menunggu-nunggu didikan, jang didjandjikan oleh U.U. D. Negara kita.

tempat, karena tidak tahan tekanan jang dideritanja.

Peraturan V. O. C. tersebut oleh Raffles dalam theori dihapuskan dan oleh Van den Bosch diganti dengan „Cultuurstelsel” jang tidak perlu diuraikan lebih lanjut karena tjukup dikenal. Akibat daripada kerja paksa ini, jalah bahwa petani kehilangan kemerdekaannja terhadap tanahnja, kemauan untuk bekerja padam, para petani djuga kehilangan kepertjajaan terhadap diri sendiri, lebih banjak lagi dari mereka jang meninggalkan desanja dan halaman pekarangannja untuk menghindarkan penderitaan jang amat berat itu. Akibat lain jalah bahwa struktur desa, jang mula2 agak demokratis itu mendjadi rusak sama sekali.

Belanda sendiri mengaku buruknja „Cultuurstelsel” dengan menamakannja „halaman hitam” dalam sedjaraahnja, meskipun ia menerangkan bahwa bukan stelselnja jang buruk, melainkan jang mendjalankan, jaitu terutama „de knevelende inlandsche hoofden” (pemimpin2 inlander jang corrupt).

Bagaimanapun djuga reaksi di negeri Belanda sendiri, berakibat merobah politik agraria Pemerintah Hindia Belanda dengan keluarnja Agrarische Wet 1870, jang memungkinkan orang partikelir mendapat tanah erfacht untuk mendirikan perusahaan. Modal Asing, terutama modal Belanda mengalir ke Indonesia dan terutama modal jang dipergunakan untuk perusahaan pertanian jang sangat mentjampuri perekonomian desa (seperti mengenai urusan penjewaan tanah, pengairan, djenis tanaman berhubung dengan waktu penjerahan tanah kepada pabrik, urusan tenaga pekerja, jang diam-bilnja dari masjarakat tani) menimbulkan pertanjaan2 antara modal jang bekerja ditanah air kita dengan alat2 jang modern, technici jang pandai, tjara jang effektif dan rasionil terdorong oleh tjita2 laba sebesar-besarnja dengan tidak memperhatikan kesejahteraan rakjat dan masjarakat tani jang mempunjai tjara dan pandangan hidup lain.

Segala usaha pada djaman pendjadahan Belanda, mulai dari V.O.C. — „Cultuurstelsel” sampai djaman Agrarische Wet 1870 mempunjai satu tJORAK, jaitu tJORAK drainage atau pengurasan. Hasil Indonesia berupa bahan2 export mengalir ke Negeri Belanda hingga berdjuta-djuta rupiah djumlahnja

memberi kekajaan Negeri Belanda dan kaum modalnja, sedang rakjat Indonesia ditinggal-kan miskin, supaja tenaga pekerdjia jang dibutuhkan oleh perusahaan2 tadi tetap murah dan mudah didapatnja, sehingga keuntungan bagi kaum modal Belanda tetap besar.

„Lapar-politik” ini menimbulkan begitu kemelaratan hingga Madjelis Rendah Belanda merasa perlu mengadakan „Mindere Welvaart Commissie (th. 1902). Akibat dari pada penjelidikan ini dan terdorong oleh kepentingan sendiri karena pada waktu itu djuga mulai timbul gerakan nasional, tim-bullah aliran „ethische politiek” dan tumbuhlah djawatan2 kemakmuran („welvaart-diensten”) a.l. djuga Landbouw Voorlich-tingsdienst.

Akan tetapi karena politikna pemerintah dijadahan tidak berubah, djawatan2 tadi sebagai alatnja tidak dapat merobah keadaan sehingga pada tahun 1927 Dr. J. H. Boeke dalam madjallah „Koloniale Studien” mengatakan bahwa polilik kemakmuran jang telah bertabun-tahun didjalankan tidak menambah kemakmuran bangsa Indonesia, sebaliknya jang tambah jalah padatnja penduduk, hal mana hanja menguntungkan kaum pengusaha asing (belanda), sehingga kalau politik ini tidak dirobah Rakjat Indonesia akan didorong semuanja untuk menjadi kuli, jang dengan pekerdjiaannja hanja tjukup mendapat sekedar sepintjuk nasi.

II. Tudjuan dan pokok dasar ekonomi Negara Republik Indonesia.

Disini prae-adviseur hanja mensitir pokok2 dari prae-advies lain jaitu:

„Dasar politik perekonomian Indonesia jalah memenuhi keperluan hidup rakjat seluruhnja, supaja rakjat Indonesia mendjadi rakjat jang makmur, djasmani dan rohani. Tenaga produksi masjarakat harus diatur dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan barang2 keperluan hidup rakjat itu. Apa jang ta’ dapat dihasilkan sendiri, harus didatangkan dari luar negeri. Djadi import adalah sambungan jang tidak dari pada produksi nasional. Baru sesudah itu datang export untuk membajar import itu.

„Bukanlah export-ekonomi” jang harus diutamakan seperti politik perekonomian Hindia Belanda dahulu, melainkan: menimbulkan tenaga pembeli rakjat jang sebesar-besarnja”.

Teranglah perbedaan besar dari pada tudjuan dan pokok dasar ékonomi Hindia Belanda dan dari Negara Republik Indonesia.

III. Tudjuan dan tjara bekerdja djawatan Pertanian Rakjat.

Karena perbedaan tudjuan dan pokok dasar ekonomi dari Hindia Belanda dan dari Negara Republik Indonesia dengan sendirinja sebagai alatnja pemerintahan masing-masing L.V.D. dan Djawatan Pertanian Rakjat mempunjai tudjuan dan tjara bekerdja berlainan.

- titik berat dari pada pekerdjaan dilettakkan oleh: L.V.D. kepada perusahaan orang tani, dan lebih memperhatikan teknik.

D.P.R. kepada orang taninja, lebih memperhatikan djiwa tani, orang tani sebagai anggauta masjarakat.

2. Penerangan:

L.V.D. bersifat perseorangan (individuel) dan umumnya bersikap dingin terhadap organisasi Rakjat, organisasi yg. berbau politik ditolakna;

D.P.R. bersifat massaal, oleh karena jang akan diperbaiki masjarakat jang berdasar gotong-rojong, menghidupkan „orgaanvorming” untuk bekerdja bersama sebagai sjarat mutlak, turut menju-sun masjarakat jang hidup dan beridologi menurut tjita-tjita Negara.

IV. Pembangunan masjarakat desa.

Telah digambarkan apa akibat dari pada „lapar - politik” jang didjalankan oleh Belanda. Oleh Djepang politik ini diganti dengan „bajonet - politik”. Dengan sendirinja Pemerintah kita jang berdasar Pantja - Sila tidak dapat mempergunakan kedua politik tersebut. Kita harus membangun Negara kita kembali dan dalam pembangunan ini diam-bilnja desa sebagai pokok pangkalan, karena desa di Indonesia merupakan suatu kesatuan kuat tumbuh dari sedjarah, dan masih sangat mempengaruhi sepak terjang dan tjara hidup Rakjat tani, walaupun lebih kurang dari dulu.

Desa ini perlu diperbaharui, tidak rumah-rumahnja atau pagarnja, melainkan djiwa

orang2nja, sehingga didalam desa tumbuh, lah djiwa baru jang hidup, jang dynamis-jang selalu mengikuti perubahan djaman sehingga desa dapat disebut „old but over .new”.

V. Tudjuan B.P.P. dan desa Baru.

Apa jang diuraikan sebagai tudjuan B.P.P. dan Desa Baru dalam konperensi Djawatan Pertanian di Madiun bagian besar telah dimuat di „Berita Perekonomian” No. 3 — 4 dalam karangan: Pendjelasan tentang B.P.P. dan Desa Baru oleh Sdr. Soetijo djuga.

Tinggallah kesimpulannja prae-adviseur jang dibawah ini dimuat dengan lengkapnja

Kesimpulan:

Politiek Export - Ekonomi Pemerintah Belanda jd. mengabaikan kepentingan Rakjat jang dimulai dengan V.O.C. disusul oleh Cultuur-stelsel kemudian dilandjutkan dengan perusahaan kapital asing setjara besar-besaran dengan alat jang modern (hoogkapitalisme) mengakibatkan terdesaknja kaum tanidan menghalang berkembangnja initiatief orang tani jang merupakan masjarakat agraria, kedjurusan buruh dan petaniketjil jang tidak mempunjai hubungan dengan luar negeri.

Tudjuan Ekonomi Pemerintah Negara Republik Indonesia memutar haluan diatas 180 % dan mementingkan kebutuhan Rakjat sebagai pedoman. Hal ini menghendaki perobahan masjarakat jang radicaal jang harus dibangun dulu. Dalam mengadakan perobahan dan menjelenggarakan pembangunan Negara, Rakjat harus dididik dan dibimbing. Dalam pendidikan ini initiatief dan auto-activiteitna harus dihidupkan. Dalam menjelenggarakan pendidikan Rakjat ini Djawatan Pertanian Rakjat dari Kementerian Kemakmuran turut mengambil bagian mendidik kaum taninja dengan desa sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebagai pokok pangkal permulaan (startingspoint). D.P.R. berkejakinan bahwa pembangunan Negara harus dilakukan dengan merubah djiwa masjarakat desa. Dan oleh karena itu Djawatan Pertanian Rakjat mengambil initiatief menjelenggarakan B.P.P. sebagai tpaus cultuur masjarakat desa.